



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TAHUN 2025

Alamat: Jalan Bung Karno Komplek Kemutar Telu Center (KTC)
Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat - NTB
Telp. (0372) 172610300150, Pos-el: pmdsumbawabarat2@gmail.com
Laman: www.ppid.sumbawabaratkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. Bung Karno Komplek KTC Taliwang (84355)
Telp. (0372) 8281829 Fax. (0372) 8281828 e-mail : bpm.pemdes.ksb@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nomor : 16 Tahun 2025

TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025, Maka Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Perlu Menyusun Rencana Kerja (Renja);
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 30 Juli 2025

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumbawa Barat,




H. Abdul Hamid, S.Pd., M.Pd
NIP. 19690220 198903 1 005

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga kami sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025.


Rencana Kerja Perubahan 2025 merupakan langkah atau upaya pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja maupun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025 merupakan implementasi tahunan dari Rencana Strategis (RESNISTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat diharapkan dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, serta dapat dijadikan acuan kerja selama 1 tahun ke depan dan pedoman dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Taliwang, 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumbawa Barat,



H. ABDUL HAMID, S.Pd., M.Pd
NIP. 19690220 198903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematikan Penulisan	5
BAB. II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat Daerah dan Capaian Restra Perangkat Daerah Triwulan III	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
BAB. IV PENUTUP	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat berkewajiban menyusun Renja Perubahan Perangkat Daerah untuk tahun 2025.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja Perubahan merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun berikutnya.
3. Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyusun Renja Perubahan Perangkat Daerah, guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, fokus pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta melanjutkan visi pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat yang mendasarkan pada RPJMD Tahun 2025–2029 yaitu **“Terwujudnya KSB Maju Luar Biasa Menuju Transformasi Kesejahteraan Masyarakat Sumbawa Barat”**.

Untuk mewujudkan visi pembangunan KSB Maju Luar Biasa Menuju Transformasi Kesejahteraan Masyarakat Sumbawa Barat, diperlukan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan yang selanjutnya disebut misi. Misi membantu agar visi tergambar lebih jelas, memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut. Oleh karena itu, pokok-pokok visi di atas akan dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi sebagai berikut:

1. KSB Maju dalam Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. KSB Maju dalam Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan;
3. KSB Maju dalam Kesejahteraan Sosial;
4. KSB Maju dalam Penciptaan Klaster-Klaster Ekonomi Baru berbasis Kewilayahan;
5. KSB Maju dalam Hilirisasi Sektor Perekonomian Unggulan Daerah;
6. KSB Maju dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Penguatan Fondasi Ekonomi Kerakyatan;
7. KSB Maju dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; dan
8. KSB Maju dalam Infrastruktur Dasar, Konektifitas antar Wilayah dan Penunjang Perekonomian Daerah.

Berdasarkan visi dan misi yang merupakan isi dari RPJMD periode 2025-2030 Kabupaten Sumbawa Barat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa misi yang sangat berkaitan dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka merealisasikan pelaksanaan program dan kegiatan untuk meningkatkan pembangunan desa adalah misi II yaitu **“KSB Maju dalam Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan”** dengan tujuan **“ terwujudnya pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang handal dan responsif”**, dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan desa.

Dokumen Renja Perubahan SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja Perubahan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perubahan SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan renja SKPD. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 9) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025 – 2045;
- 11) Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- 12) Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025 – 2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat dimaksudkan sebagai arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas secara berkesinambungan dalam mencapai indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk waktu satu tahun mendatang sebagai implementasi misi organisasi.
2. Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat adalah:
 - a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025.

- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2025 secara sistematis dan terorganisir.
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKAP) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat Daerah dan Capaian Restra Perangkat Daerah Triwulan II
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat selama tahun 2025 Triwulan I.

- **Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

- **Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Triwulan III Tahun 2025**

Pada tahun 2025 alokasi anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebesar Rp. **17.482.846.569,-** dengan realisasi pada triwulan III sebesar Rp. **10.475.830.216,-** atau **59,92%** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. **16.934.125.639,-** dengan realisasi **Rp.10.468.830.216,-** atau **61,82 %** dan Belanja Modal sebesar Rp. **548.720.930,-** dengan realisasi sebesar Rp.**7.000.000,-** atau **1,28 %**. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan 4 (empat) program 11 (sebelas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan. Adapun uraian dari realisasi anggaran masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan dan 24 (Dua Puluh Tiga) sub kegiatan yaitu:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 57.769.250,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Hasil : Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi anggaran sebesar Rp. 39.767.500,- atau 68,84%

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.10.083.700,-

Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD

Hasil : Tersedianya Dokumen RKA SKPD

Realisasi anggaran sebesar Rp.5.724.250,- atau 56,77%

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Masukan : Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Ini Sebesar Rp.10.951.240,-.

Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD

Hasil : Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD

Realisasi anggaran sebesar Rp.8.076.400,- atau 73,75%

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.337.750,-

Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD

Hasil : Tersedianya Dokumen DPA SKPD

Realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0 %

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.12.137.750,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD

Hasil : Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD

Realisasi anggaran sebesar Rp. 6.964.500,- atau 57,38%

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.8.962.750,-
Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lapoan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Knerja SKPD
Hasil : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Realisasi anggaran sebesar Rp.7.275.000,- atau 81,17%

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Masukan: Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.4.611.149.936,-
Keluaran : Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Hasil : Tersedianya Laporan Gaji dan Tunjangan ASN
Realisasi anggaran sebesar Rp.3.187.903.292,- atau 69,13%

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 23.830.585,-
Keluaran : Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
Hasil : Tersedianya Laporan Verifikasi Administrasi Keuangan SKPD
Realisasi anggaran sebesar Rp. 19.767.500,- atau 82,95 %

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 19.338.250,-
Keluaran : Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
Hasil : Tersedianya Laporan Akuntansi Keuangan SKPD
Realisasi anggaran sebesar Rp. 14.604.000,- atau 75,52%

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.499. 000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Hasil : Tersedianya Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD

Realisasi anggaran sebesar Rp. 4.147.000,- atau 55,30%.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.534.500,-

Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD

Hasil : Tersedianya Laporan Realisasi Fisik Keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD

Realisasi anggaran sebesar Rp. 3.909.500,- atau 41,00%

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.881.500,-

Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Hasil : Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi anggaran sebesar Rp. 3.455.000,- atau 58,74%

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 12.316.150,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Hasil : Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi anggaran sebesar Rp. 8.228.600,- atau 66,81%

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.212.620,-

Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Hasil : Tersedianya Penerangan Gedung Kantor
Realisasi anggaran sebesar Rp. 4.830.575 atau 66,97%

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 28.673.960,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Hasil : Terselenggaranya Pengelolaan Arsip Dinamis Perangkat Daerah

Realisasi anggaran sebesar Rp. 8.431.950,- atau 29,41%

- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 240.438.471,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Hasil : Terselenggaranya Pengelolaan Arsip Dinamis Perangkat Daerah

Realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0 %

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 227.834.700,-

Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Hasil : Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Realisasi anggaran sebesar Rp. 8.326.980,- atau 3,65%

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 16.875.850,-

Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Hasil : Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Realisasi anggaran sebesar Rp11.699.956,- atau 69,33 %

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 545.974.935,-

Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Hasil : Jumlah Administratur Pelayanan Umum Kantor

Realisasi anggaran sebesar Rp. 233.450.625,- atau 42,75 %

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 78.820.000,-

Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Hasil : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan SKPD

Realisasi anggaran sebesar Rp. 48.928.159,- atau 62,08 %

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 40.641.600,-

Keluaran: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Hasil : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional SKPD

Realisasi anggaran sebesar Rp. 28.655.400,- atau 70,51%

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 90.129.994,-

Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Hasil : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor SKPD

Realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0 %

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 20.391.505,-
Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Hasil : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor SKPD
Realisasi anggaran sebesar Rp. 6.850.000,- atau 33,59 %
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 72.604.000,-
Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Hasil : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor SKPD
Realisasi anggaran sebesar Rp. 51.900.000,- atau 71,48 %

2. Program Penataan Desa

Pogram ini ada 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 157.346.000,-
Keluaran : Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
Hasil : Terlaksananya Pendampingan/Fasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa
Realisasi anggaran sebesar Rp.46.863.340,- atau 29,78 %
- Fasilitasi Tata Wilayah Desa
Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 90.085.610,-
Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya
Hasil : Terlaksananya Pendampingan/Fasilitasi Tata Wilayah Desa
Realisasi anggaran sebesar Rp. 38.116.210,- atau 42,31 %

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 9 (Sembilan) sub kegiatan sebagai berikut:

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 49.675.000,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Hasil : Terlaksananya Pendampingan/Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Realisasi anggaran sebesar Rp.29.231.240,- atau 58,84 %

- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.517.600,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Hasil : Terlaksananya Pendampingan/Fasilitasi Penyusunan RKP Desa

Realisasi anggaran sebesar Rp. 17.902.300,- atau 70,16 %

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.214.923.558,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil : Terlaksananya Pendampingan/Fasilitasi Penyusunan APB Desa

Realisasi anggaran sebesar Rp. 714.528.392,- atau 58,81 %

- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 67.632.000,-

Keluaran : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas

Hasil : Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Realisasi anggaran sebesar Rp. 32.544.400,- atau 48,12%

- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 136.281.200,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa

Hasil : Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa

Realisasi anggaran sebesar Rp. 58.408.400,- atau 42,86 %

- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 21.389.360,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun

Hasil : Terlaksananya Penyusunan Profil Desa Desa

Realisasi anggaran sebesar Rp.15.832.875,- atau 74,02 %

- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 17.430.950,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Hasil : Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Realisasi anggaran sebesar Rp.1.965.750,- atau 11,23 %

- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.740.000,-

Keluaran : Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas

Hasil : Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Realisasi anggaran sebesar Rp.34.086.075,- atau 67,18 %

- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 54.659.750,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Hasil : Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Realisasi anggaran sebesar Rp. 51.397.000,- atau 94,03 %

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut:

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.418.105.915,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

Hasil : Tersedianya Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Realisasi anggaran sebesar Rp. 4.409.246.691,- atau 59,44 %

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 863.455.760,-

Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Hasil : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Realisasi anggaran sebesar Rp. 480.648.689,-,- atau 55,67 %

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar
Rp. 99.764.330,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Hasil : Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan
Usaha
Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Realisasi anggaran sebesar Rp.17.300.000,- atau 17,34 %

- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar
Rp. 129.811.250,-

Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa
dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Hasil : Tersedianya Laporan Hasil Fasilitasi TTG

Realisasi anggaran sebesar Rp. 119.021.250,- atau 91,69%

- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar
Rp. 173.738.290,-

Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat

Hasil : Tersedianya Laporan Hasil Fasilitasi BBGRM

Realisasi anggaran sebesar Rp.7.765.000,- atau 4,47 %

- Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Masukan : Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar
Rp. 742.900.000,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK
Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Hasil : Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak
PKK

Realisasi anggaran sebesar Rp. 688.086.017,- atau 92,62 %

Sedangkan untuk tingkat pencapaian Renstra merupakan hasil akumulasi kegiatan tahunan secara berkesinambungan ditunjukkan dengan semakin meningkatnya upaya koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan semakin meningkatnya kualitas dokumen perencanaan.

TABEL 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA S/D TRIWULAN III TAHUN 2025**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN			
						TARGET RENJA SKPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TRIWULAN 1 TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
		TUJUAN : MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEMANDIRIAN DESA	Indeks Desa Membangun (IDM)	Poin	0,740	0,7	0,71	0,72	1,01	0,740	2,16	2,92	
		SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP	Poin	72	70	80	80	1	72	222,00	3,08	
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	%	82,34	75	75	75	1	82,34	232,34	2,82

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN					
						TARGET RENJA SKPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TRIWULAN 1 TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)				
	KABUPATEN/KOTA	2. Realisasi Keuangan Perangkat Daerah.	%	90	97,35	75	95,2	1,27	90	282,55	3,14				
		3. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Poin	87,01	84	85	85	1,00	87,01	256,01	2,94				
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	%	100	100	100	92,310	0,92	100	292,31	2,92
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	6	6	6	1	6	18	3
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	3	3

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA SKPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TRIWULAN 1 TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	3	3
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	3	3
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Paerubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	3	3

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA SKPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TRIWULAN 1 TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	3	3	1	3	9	3,00
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	1,00	100	300	3,00
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	41	41	41	41	1	41	123	3
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	4	4	3	0,75	1	8	8

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA SKPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TRIWULAN 1 TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	13	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	1	12	9	0,75	12	22	1,83
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	3	3
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	12	9	0,75	12	33	2,75

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN					
						TARGET RENJA SKPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TRIWULAN 1 TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)				
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi barang milik daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	300	3	
2	13	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	4	-	4	4	1	4	8	2
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian Tepat waktu	%	100	50	100	0	0	100	150	1,5
2	13	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	4	4	4	4	1	4	12	3
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum perangkat daerah	%	100	100	100	100	1	100	300	3

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA SKPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TRIWULAN 1 TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10	10	10	1	1	21	21
2	13	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip Dinamis SKPD	Dokumen	12	12	12	12	1	12	36	3
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Penunjang Pelayanan Internal OPD	%	18	100	100	100	1	18	218	12,11
2	13	01	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor yang disediakan	Unit	1	-	-	-		1	1	1,00
2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguann Lainnya yang Diadakan	Unit	9	10	5	5	1	9	24	2,67
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	75	0,75	100	275	2,75

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA SKPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TRIWULAN 1 TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	2	4	3	0,75	2	7	3,5
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	4	3	0,75	1	5	5
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	100	100	100	100	1	100	300	3
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	18	17	18	18	1	18	53	2,94
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	1	1	1	1	3	3

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA SKPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TRIWULAN 1 TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	13	01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	1	5	5	1	-	6	#DIV/0!
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	56	25	4	4	1	56	85	
2	13	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	Unit	1	43	2	2	1	-	45	
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Porsentase Desa Tertib Tata Wilayah	%	95	100	100	100	1	95	295	3,11
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Porsentase Desa Tertib Tata Wilayah	%	52,63	100	100	100	1	52,63	252,63	4,80

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA SKPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TRIWULAN 1 TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Satatus Desa	Jumlah Desa yang melakukan pembentukan, Penghapusan, dan penggabungan Status Desa	Desa	2	2	2	2	1	2	6	3
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	8	2	5	5	1	8	15	1,875
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Ketertiban Administrasi Desa	%	100	100	100	100	1	100	300	3
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Porsentase BUMDes Aktif Tingkat Pemenuhan administrasi Desa	%	91,2	100	100	100	1	91,2	291,2	
2	07	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk hukum desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	1	57				1	58	58

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA SKPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TRIWULAN 1 TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	07	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	1	57	1	1	1	1	59	59
2	07	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1	57	1	1	1	1	59	59
2	07	04	2.01	05	Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	156	114	57	57	1	156	327	2,10
2	13	4	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan MUSDES	Desa	-	57	57	57	1	-	114	#DIV/0!
2	07	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Dokumen	1	1	1	1	1	1	3	3
2	13	4	2.01	06	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terpilihnya Kepala Desa Definitif yang Legitimite	Desa		16	-	-			16	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA SKPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TRIWULAN 1 TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	07	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	58	-	1	1	1	58	59	1,02
2	07	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	1	1	1	1	1	3	3
2	07	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	58	58	58	58	1	58	174	3
2	07	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	3	3
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100	100	1	100	300	3

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA SKPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TRIWULAN 1 TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Porsentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina, Porsentase TTG yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	1	100	300	3
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	3	3

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA SKPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TRIWULAN 1 TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapaitasnya	Lemba ga	65	65	65	65	1	65	195	3
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Dokum en	1	1	1	1	1	1	3	3
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Lapora n	1	1	1	1	1	1	3	3

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA SKPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TRIWULAN 1 TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	-	1	1	1	1	2	2
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	-	1	1	1	1	2	2

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikatif sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja serta untuk mengidentifikasi permasalahan pelayanan untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa salah satu penyelenggara Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki tugas mendukung Visi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025- 2029 yaitu **“Terwujudnya KSB Maju Luar Biasa Menuju Transformasi Kesejahteraan Masyarakat Sumbawa Barat”**. Untuk mewujudkan Visi KSB diperlukan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilakukan yang disebut misi. dalam rangka merealisasikan pelaksanaan program dan kegiatan untuk meningkatkan pembangunan desa, maka misi yang selaras dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah **Misi II “KSB Maju dalam Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan”** dengan merumuskan tujuan **“Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa”** dan menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat antara lain:

Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	1 Meningkatkan kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	1 Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar
			2 Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			standar
			3 Pemenuhan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sesuai standar
			4 Pemenuhan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai standar
			5 Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standar
			6 Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai standar
			7 Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai standar
			8 Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatkan kualitas penataan desa	1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Desa
		Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	1 Meningkatkan Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1 Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 1

TABEL 2.2
PENCAPAIAN TARGET KINERJA PELAYANAN OPD
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA S/D TRIWULAN III TAHUN 2025
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

No	Indikator Kinerja	Target Restra OPD				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Realisasi Anggaran	75%	75%	75%	75%	95,20%	87,34%	75%	75%	
	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
	Persentase Pemerintahan Desa Berkinerja Baik	17.5	25.8	29.3	98	31,03	56,89	29,3	98	
	Indeks Ketahanan Ekonomi Desa	0.63	0.64	0.65	0.66	0,67	0,38	0.65	0.66	
	Indeks Ketahanan Sosial Desa	0.83	0.84	0.85	0.86	0,82	0,28	0.85	0.86	
	Indeks Desa Membangun							0,740	0,765	
	Nilai AKIP							72	73	
	Tingkat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							20,69	24,14	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat adalah unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum Pemerintah dan Pembangunan

Sedangkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan teknologi tepat guna, pembinaan partisipasi social budaya masyarakat, manajemen dan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan teknologi tepat guna, pembinaan partisipasi social budaya masyarakat, manajemen dan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SKPD antara lain :

1. Pelayanan administrasi dan koordinasi antara unit kerja lingkup masih belum maksimal;
2. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Kurang berperannya lembaga kemasyarakatan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan;
4. Terjadinya pergeseran nilai-nilai adat dan kearifan lokal di Tingkat Desa dan Kelurahan;
5. Lambannya pertumbuhan ekonomi di Desa dan Kelurahan sebagai akibat masih kurang berperannya lembaga-lembaga ekonomi di Desa dan Kelurahan;
6. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.

Untuk mendukung pencapaian Visi Kabupaten Sumbawa Barat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025-2029, maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bertanggung jawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJP), menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang sinergis, akuntabel dan partisipatif. Semua proses tersebut diawali dengan musrenbang RKPD mulai tingkat Kecamatan dan Kabupaten serta pelaksanaan forum SKPD guna menyelaraskan usulan program/kegiatan kecamatan dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Dokumen ini akan digunakan sebagai pedoman seluruh SKPD dalam menyusun Perubahan Renja SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksud untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan prioritas dan pagu indikatif berdasarkan rancangan awal RKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, serta indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Rancangan RKPD pada setiap SKPD telah disusun pada awal tahun, begitu pula dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat telah menyusun RKPD tahun 2025 pada awal tahun 2024. Ada beberapa hal yang menjadi catatan bahwa RKPD yang disusun pada dasarnya telah disesuaikan dengan Renstra SKPD akan tetapi ada beberapa kegiatan yang menjadi revisi/perbaikan karena kegiatan yang tercantum pada RKPD adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun akan tetapi tidak ada pada RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat sehingga perlu adanya sinkronisasi program kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagaimana pada tabel 2.3.

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
2.13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kab.Sumbawa Barat			17.443.015.019		Kab.Sumbawa Barat			17.353.391.011,00	Kebutuhan menurun sebesar 0,99% dari pagu indikatif Rp. 17.443.015.019,-
	TUJUAN : MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEMANDIRIAN DESA	Kab.Sumbawa Barat	Indeks Desa	0,740	17.443.015.019		Kab.Sumbawa Barat	Indeks Desa	0.740	17.353.391.011,00	
SASARAN 1		Kab.Sumbawa Barat	NILAI AKIP	72,00	5.119.823.404		Kab.Sumbawa Barat	NILAI AKIP	73,00	6.232.257.996	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kab.Sumbawa Barat	Realisasi Kinerja Perangkat	82,34	164.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Kab.Sumbawa Barat	Realisasi Kinerja Perangkat	82,34	110.242.440	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA		Daerah			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Daerah			
			Realisasi Keuangan Perangkat Daerah.	90,00	3.931.823.404			Realisasi Keuangan Perangkat Daerah.	90,00	4.671.352.221	
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	87,01	1.024.000.000			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	87,01	1.450.663.335	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Sumba Barat	Tingkat Pemenuhan dokumen penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100	164.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Sumba Barat	Persentase Pemenuhan dokumen penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100	110.242.440	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Sumba wa Barat	Tingkat pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100	3.931.823.404	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Sumba wa Barat	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100	4.671.352.221	
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Sumba wa Barat	Tingkat Pemenuhan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sesuai standar	100	46.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Sumba wa Barat	persentase kelancaran pelayanan administrasi barang perangkat daerah	100	5.881.500	
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Sumba wa Barat	Tingkat Pemenuhan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai standar	100	110.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Sumba wa Barat	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian Tepat Waktu	100	12.316.150	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Sumba wa Barat	Tingkat Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standar	100	88.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Sumba wa Barat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah	100	35.886.580	
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Sumba wa Barat	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai standar	100	265.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Sumba wa Barat	persentase pemenuhan barang penunjang pelayanan internal SKPD	100	346.311.221	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Sumba wa Barat	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai standar	100	215.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Sumba wa Barat	persentase pemenuhan jasa penunjang urusan internal SKPD	100	747.680.785	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Sumba wa Barat	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	300.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Sumba wa Barat	persentase kelancaran pemeliharaan barang milik SKPD	100	302.587.099	
SASARAN 2 :		Kab.Sumba wa Barat	TINGKAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	20,69	12.323.191.615		Kab.Sumba wa Barat		20.69	11.121.133.015	
II	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab.Sumba wa Barat	Persentase Fasilitas Penataan Desa	100	74.085.610		Kab.Sumba wa Barat		100	74.085.610	
			Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0	0				0	0	
			Persentase peningkatan status desa mandiri	58,62	56.410.000				58,62	56.410.000	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab.Sumba wa Barat	Persentase Desa Tertib	48,28	130.495.610	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab.Sumba wa Barat	persentase desa yang	100	130.495.610	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Tata Wilayah					telah ditata			
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	0	0	0	Kab.Sum bawa Barat	0	0	0	0
2.13.03.2.01	Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Kab.Sumba awa Barat	Persentase kerjasama pembangunan kawasan perdesaan	0	0		Kab.Sumb awa Barat	0	0	0	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab.Sumb awa Barat	1.Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	11,11	118.372.000		Kab.Sum bawa Barat		11,11	118.372.000	
			2. Persentase Fasilitas tata Kelola Desa	100	1.361.658.660				100	1.408.857.860	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab.Sumba wa Barat	Persentase desa yang dibina	13,79	1.480.030.660		Kab.Sumbawa Barat		13,79	1.527.229.860	
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab.Sumbawa Barat	1. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	100	9.899.195.585		Kab.Sumbawa Barat		0	8.649.937.785	
			2. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa (LAD)	100	813.469.760				100	813.469.760	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Sumba wa Barat	Persentase lembaga Masyarakat yang dibina	4,54	10.712.665.345		Kab.Sumba wa Barat		4,54	9.463.407.545	

2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025, selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025, Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat, yaitu fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa.

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2025
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
2,13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				17.353.391.011
	SASARAN 1 :		NILAI AKIP	72,00	6.232.257.996
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Sumbawa Barat	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	82,34	110.242.440
			Realisasi Keuangan Perangkat Daerah.	90,00	4.671.352.221
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	87,01	1.450.663.335
2.13.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Sumbawa Barat	Persentase Pemenuhan dokumen penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100	110.242.440
2.13.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Sumbawa Barat	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100	4.671.352.221
2.13.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Sumbawa Barat	persentase kelancaran pelayanan administrasi barang perangkat daerah	100	5.881.500

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Sumbawa Barat	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian Tepat Waktu	100	12.316.150
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Sumbawa Barat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah	100	35.886.580
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Sumbawa Barat	persentase pemenuhan barang penunjang pelayanan internal SKPD	100	346.311.221
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Sumbawa Barat	persentase pemenuhan jasa penunjang urusan internal SKPD	100	747.680.785
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Sumbawa Barat	persentase kelancaran pemeliharaan barang milik SKPD	100	302.587.099
	SASARAN 2 :		TINGKAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		11.121.133.015
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab.Sumbawa Barat	Persentase Desa Tertib Tata Wilayah	100,00	130.495.610
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab.Sumbawa Barat	persentase desa yang telah ditata	48,28	130.495.610
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Kab.Sumbawa Barat	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	0	-
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Kab.Sumbawa Barat	Persentase kerjasama pembangunan kawasan perdesaan	0	-
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab.Sumbawa Barat	1.Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	11,11	118.372.000
			2. Persentase Fasilitasi tata Kelola Desa	100	1.408.857.860

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab.Sumbawa Barat	persentase desa yang dibina	13,79	1.527.229.860
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab.Sumbawa Barat	1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	0	8.649.937.785
			2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa (LAD)	100	813.469.760
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Sumbawa Barat	persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	4,54	9.463.407.545

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun rencana program dan kegiatan serta Pendanaan Tahun 2025 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 55 sub kegiatan dengan rincian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2025

KODE	URAIAN TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	SAT UAN	TARGET	
					2025	
					K	P
1	2	3	4	5	6	
2,13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					17.443.015.019
	TUJUAN : MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEMANDIRIAN DESA		Indeks Desa Membangun (IDM)	Poin	0,740	17.443.015.019
	SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai AKIP	Poin	72,00	5.119.823.404
2.13.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	1. Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	%	82,34	102.518.940
			2. Realisasi Keuangan Perangkat Daerah.	%	90,00	4.239.427.629
			3. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Poin	87,01	777.876.835
2.13.0 1.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar	%	100	102.518.940

KODE	URAIAN TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
					2025	
					K	P
1	2	3	4	5	6	
2.13.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	55.315.750
2.13.0 1.2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	10.136.200
2.13.0 1.2.01. 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	9.691.240
2.13.0 1.2.01. 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	9.775.250
2.13.0 1.2.01. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	8.637.750
2.13.0 1.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	3	8.962.750

KODE	URAIAN TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
					2025	
					K	P
1	2	3	4	5	6	
			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2.13.0 1.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	-
2.13.0 1.2.01. 0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	-
2.13.0 1.2.01. 0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	20	-
2.13.0 1.2.01. 0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	0	0

KODE	URAIAN TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
					2025	
					K	P
1	2	3	4	5	6	
2.13.0 1.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar	Tingkat Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar	%	100	4.239.427.629
2.13.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	48	4.178.715.294
2.13.0 1.2.02. 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	24.340.585
2.13.0 1.2.02. 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	19.338.250
2.13.0 1.2.02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.499.000
2.13.0 1.2.02. 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	-

KODE	URAIAN TUJUAN/SASARAN/PROGRA M/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	SAT UAN	TARGET	
					2025	
					K	P
1	2	3	4	5	6	
2.13.0 1.2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lap oran	12	9.534.500
2.13.0 1.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sesuai standar	Tingkat Pemenuhan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sesuai standar	%	100	5.881.500
2.13.0 1.2.03. 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok ume n	1	-
2.13.0 1.2.03. 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap oran	2	-
2.13.0 1.2.03. 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap oran	4	5.881.500
2.13.0 1.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai standar	Tingkat Pemenuhan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai standar	%	100	12.316.150

KODE	URAIAN TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
					2025	
					K	P
1	2	3	4	5	6	
2.13.0 1.2.05. 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	12.316.150
2.13.0 1.2.05. 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	-
2.13.0 1.2.05. 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	-
2.13.0 1.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standar	Tingkat Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standar	%	100	30.391.580
2.13.0 1.2.06. 0002	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	7.212.620
2.13.0 1.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	-
2.13.0 1.2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	23.178.960

KODE	URAIAN TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
					2025	
					K	P
1	2	3	4	5	6	
2.13.0 1.2.06. 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	-
2.13.0 1.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai standar	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai standar	%	100	9.272.750
2.13.0 1.2.07. 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-
2.13.0 1.2.07. 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	9.272.750
2.13.0 1.2.07. 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	-
2.13.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai standar	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai standar	%	100	595.926.750
2.13.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	16.875.850

KODE	URAIAN TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	SAT UAN	TARGET	
					2025	
					K	P
1	2	3	4	5	6	
2.13.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap oran	4	579.050.900
2.13.0 1.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	124.088.105
2.13.0 1.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13	69.805.000
2.13.0 1.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	39.141.600
2.13.0 1.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	1	-
2.13.0 1.2.09. 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	40	15.141.505

KODE	URAIAN TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
					2025	
					K	P
1	2	3	4	5	6	
	SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		Tingkat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	20,69	12.323.191.615
2.13.0 2	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	%	100	130.495.610
2.13.0 2.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa Tertib Tata Wilayah	%	48,28	130.495.610
2.13.0 2.2.01. 0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	1	56.410.000
2.13.0 2.2.01. 0002	Fasilitas Tata Wilayah Desa	Terlaksananya Fasilitas Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	58	74.085.610
2.13. 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	%	0	0
2.13.0 3.2.01	Kegiatan Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Meningkatnya Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase kerjasama pembangunan kawasan perdesaan	%	0	0
2.13.0 3.2.01. 0003	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	0	0
2.13. 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya. 2. Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	% %	11,11 100	118.372.000 1.361.658.660

KODE	URAIAN TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
					2025	
					K	P
1	2	3	4	5	6	
2.13.0 4.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina	%	13,79	1.480.030.660
2.13.0 4.2.01. 0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	2	49.675.000
2.13.0 4.2.01. 0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	58	25.517.600
2.13.0 4.2.01. 0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	58	1.057.124.000
2.13.0 4.2.01. 0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	58	67.632.000
2.13.0 4.2.01. 0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	58	124.356.000
2.13.0 4.2.01. 0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	0	0

KODE	URAIAN TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
					2025	
					K	P
1	2	3	4	5	6	
2.13.0 4.2.01. 0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	58	25.151.360
2.13.0 4.2.01. 0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	58	25.174.950
2.13.0 4.2.01. 0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	58	50.740.000
2.13.0 4.2.01. 0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	54.659.750
2.13.0 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).	%	0	9.899.195.585
			2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa (LAD)	%	100	813.469.760
2.13.0 5.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Persentase lembaga Kemasyarakatan yang dibina	%	4,54	10.712.665.345

KODE	URAIAN TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
					2025	
					K	P
1	2	3	4	5	6	
2.13.0 5.2.01. 0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	8.647.386.515
2.13.0 5.2.01. 0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	7	813.469.760

KODE	URAIAN TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
					2025	
					K	P
1	2	3	4	5	6	
2.13.0 5.2.01. 0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	4	122.229.530
2.13.0 5.2.01. 0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	3	212.581.250
2.13.0 5.2.01. 0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	174.098.290
2.13.0 5.2.01. 0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	742.900.000

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini sangatlah penting sebagai wujud nyata dari tanggungjawab Pemerintah dalam memahami dan menyelesaikan berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat dengan melibatkan unsur-unsur dan pelaku pembangunan (*stakeholders*) untuk mewujudkan *Good Governance* yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mewujudkan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya dan pembangunan tahunan pada umumnya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.

Taliwang, 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumbawa Barat,




H.ABDUL HAMID, S.Pd.,MM
NIP. 19690220 198903 1 005